KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sejahterakan guru honorer, legislator usul gaji Rp 5 juta per bulan
Tanggal : Minggu, 25 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sejahterakan Guru Honorer

Legislator Usul Gaji Rp 5 Juta Per Bulan

SUMBER IG PRIBADI

Lalu Hadrian

KESEJAHTERAAN guru honorer mendapat perhatian serius kalangan Senayan. Sebab pahlawan tanpa tanda jasa itu seringkali menerima upah jauh di bawah upah minimum regional (UMR).

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai, kesejahteraan guru, khususnya guru honorer masih jauh dari kata layak. Masih banyak guru honorer yang menerima gaji tidak lebih dari Rp 500 ribu per bulan. Dalam praktiknya, tidak sedikit guru yang menerima gaji secara tidak rutin, dibayarkan setiap tiga hingga enam bulan sekali.

Bahkan ada guru honorer yang mengalami pemotongan upah. "Kita harus jujur mengakui kesejahteraan guru kita hari ini masih jauh dari harapan," ujar Lalu Hadrian dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Diketahui, gaji guru honorer Sekolah Dasar (SD) berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan. Di beberapa daerah terpencil, angka ini bisa lebih rendah. Sementara gaji guru honorer Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta per bulan. Sedangkan gaji guru honorer SMA/SMK sebesar Rp 800 ribu hingga Rp 2,5 juta per bulan.

Kondisi ini, lanjut Lalu Hadrian, tentu sangat memprihatinkan dan tidak sebanding dengan peran besar guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di kisaran Rp 3.500 triliun. Dengan alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen atau sekitar Rp 750 triliun.

"Tapi besarnya anggaran tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pendidik," keluh politikus PKB ini.

Berdasarkan hitungan Komisi X DPR, bila 20 persen anggaran pendidikan itu benar-benar digunakan secara utuh untuk kepentingan pendidikan, idealnya gaji guru honorer minimal Rp 5 juta per bulan. Angka tersebut merupakan bentuk kelayakan yang wajar. "Soalnya beban mengajar yang berat, tantangan di lapangan, dan kondisi ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian," ujarnya.

Komisi X DPR, lanjutnya, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk meluruskan dan mengoreksi penggunaan anggaran pendidikan agar sesuai dengan amanat konstitusi dan benar-benar tepat sasaran. Yakni untuk kepentingan pendidikan nasional, kesejahteraan guru, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidik, serta peningkatan kualitas peserta didik.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menambahkan, kondisi kesejahteraan guru honorer di Indonesia berada di bawah standar kemanusiaan. Berdasarkan data terbaru, ditemukan fakta sekitar 20,5 persen guru honorer hanya menerima penghasilan berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

"Ketimpangan upah ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pembiaran oleh negara terhadap hak ekonomi dan sosial warga negaranya," kritik Mafirion dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026). ■ TIF